

ANALISIS KUANTITATIF PEMERINGKATAN PENILAIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Andi Putranto, Syekhan Dartiko Aji, dan Jalu Naufal Falah

Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta – Indonesia
andi.fib@ugm.ac.id

Abstract, Quantitative Analysis for Ranking Assessment of Cultural Heritage Buildings in Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta. Many cultural heritage buildings in Kulon Progo Regency can be dated back to the period before and during Indonesia's colonial period. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2010 Concerning Cultural Conservation, a building could be categorized as Cultural Heritage if it has passed the registration, assessment, or assessment process, or until authorities may establish its rank. The assessment of cultural heritage buildings is carried out to prepare a recommendation text to designate them as cultural heritage. Therefore, this research tries to re-evaluate cultural heritage buildings using quantitative analysis methods with weighting factors to obtain a final value which produces a ranking of cultural heritage buildings related to aspects of protection, development and utilization while still being guided by preservation principles based on the numbers obtained as final assessment. It is hoped that the results of the assessment using this formula will be used in ranking according to the final value obtained by each cultural heritage building which is closely related to its utilization and development while still being guided by the principles of cultural heritage preservation. The results of this research propose four classes, namely 1) Buildings with low utilization and preservation; 2) Buildings with moderate utilization and preservation; 3) Buildings with high utilization and preservation, and; 4) Buildings with very high utilization and preservation. These four classes are strongly related to the priority level of future handling activities for these buildings if conditions require maintenance, both in terms of protection, development, and utilization.

Keywords: Cultural Heritage Buildings, ranking, Kulon Progo, Quantitative Analysis

Abstrak, Cukup banyak bangunan cagar budaya yang berasal dari masa prakolonial serta masa kolonial di Kabupaten Kulon Progo. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan disebut sebagai Cagar Budaya jika telah melalui proses pendaftaran, pengkajian, dan dirumuskan dalam naskah rekomendasi untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peringkatnya. Penilaian bangunan cagar budaya dilakukan untuk menyusun naskah rekomendasi dalam rangka penetapannya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menilai kembali bangunan cagar budaya dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan faktor pembobot untuk memperoleh nilai akhir yang menghasilkan peringkat bangunan cagar budaya berkaitan dengan aspek perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan dengan tetap berpedoman pada kaidah pelestarian berdasarkan angka yang diperoleh sebagai penilaian akhir. Hasil penilaian dengan formula ini diharapkan akan digunakan dalam pemeringkatan sesuai nilai akhir yang diperoleh tiap bangunan cagar budaya yang berkaitan erat dengan pemanfaatan, pengembangan dengan tetap berpedoman pada prinsip pelestarian cagar budaya. Hasil penelitian ini mengusulkan empat kelas, yaitu 1) Bangunan dengan ketermanfaatan dan kelestarian rendah; 2) Bangunan dengan ketermanfaatan dan kelestarian sedang; 3) Bangunan dengan ketermanfaatan dan kelestarian tinggi, dan; 4) Bangunan dengan ketermanfaatan dan kelestarian sangat tinggi. Keempat kelas ini berhubungan kuat dengan tingkat prioritas kegiatan penanganan ke depannya terhadap bangunan-bangunan tersebut jika terjadi kondisi yang memerlukan penanganan, baik dalam perlindungan, pengembangan, maupun pemanfaatannya.

Kata kunci: Bangunan Cagar Budaya, pemeringkatan, Kulon Progo, Analisis Kuantitatif



1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 mengenai Cagar Budaya menyebutkan bahwa cagar budaya di antaranya dapat berupa Bangunan Cagar Budaya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Permasalahan lebih banyak berfokus pada proses penilaian, berdampak pada cara analisis lanjutan yang akan menghasilkan pemeringkatan dalam konteks bangunan yang layak direkomendasikan sebagai cagar budaya (Smith et al. 2021, 1-8). Cara penilaian variabel bangunan cagar budaya yang bersifat kualitatif, lebih memiliki kecenderungan sulit untuk diolah hingga menghasilkan nilai yang bersifat absolut. Analisis kuantitatif belum banyak digunakan, khususnya di bidang arkeologi, namun cara ini jamak diterapkan dalam bidang ilmu seperti geografi serta pertanian, khususnya dengan tujuan untuk evaluasi dan penilaian. Analisis kuantitatif merupakan serangkaian proses pengumpulan, pemrosesan data, interpretasi, dan penyajian data numerik/angka untuk memperoleh pemahaman yang kuat tentang suatu fenomena atau masalah. Sedangkan analisis kualitatif data yang digunakan adalah data non numerik. Dengan menggunakan metode ini, nilai variabel yang digunakan dapat diolah secara matematis serta statistik sederhana hingga memperoleh nilai kuantitatif. Parameter atau variabel yang digunakan dalam analisis kuantitatif ini adalah arsitektur, kesejarahan, lingkungan, pemanfaatan, dan integritas (lihat lampiran 1). Gagasan tersebut dipandang sebagai suatu hal yang baru karena mencoba memasukkan kriteria-kriteria yang berpengaruh dan dianalisis secara kuantitatif yang meliputi skala *assessment* dan tujuan penilaian (Van Roosmalen 2003, 124; Unesco-Cairo 2013,4-5). Kriteria ini dicoba untuk dikaji secara lebih detail dengan mencari korelasinya secara langsung terhadap suatu objek, yaitu bangunan cagar budaya.

Bangunan yang termasuk bangunan cagar budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dulu kala sebagai pemenuhan untuk kebutuhan tempat tinggal dan tempat berlindung. Ketika manusia tinggal dalam

suatu lokasi kemudian membentuk kelompok dan menempati suatu wilayah permukiman, maka dari sanalah mulai terbentuk sekelompok masyarakat. Permukiman sebagai tempat tinggal sekelompok manusia juga melambangkan suatu bentuk kegigihan/ketahanan permukiman. Atribut kunci dari permukiman ada dua, yaitu sebagai pusat aktivitas dan interaksi sosial ekonomi dan budaya dalam ruang fisik (*well defined-area*) (Smith et al. 2021,4-5).

Peninggalan materi termasuk di dalamnya adalah bangunan sebagai bagian dari konsep permukiman yang di dalamnya meliputi organisasi sosial, teknologi (berkaitan dengan proses bermukim yang dilakukan sekelompok masyarakat), serta kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, dapat bertahan dalam satu konteks zaman. Faktor-faktor yang dianggap mampu memengaruhi kondisi tersebut di antaranya adalah 1) Perilaku manusia dan masyarakat; 2) Interaksi sosial; 3) Ukuran populasi dan kepadatannya; 4) Peranan institusi dan pemangku kepentingan (Smith et al. 2021, 2-3; Díaz-Andreu 2017, 4).

Permukiman, baik di tingkat kota besar, kota kecil, maupun desa merupakan ruang interaksi dari keempat faktor di atas dalam bentuk aktivitas sosial-ekonomi dan budaya. Interaksi tersebut dapat tercermin pada wujud fisik bangunan yang dibuat oleh sekelompok masyarakat pada suatu permukiman dalam hal bentuk bangunan serta pola keletakannya.

Peranan institusi dan perilaku dari manusia serta masyarakat antar waktu sangat berpengaruh pada kondisi kelestarian tinggalan cagar budaya yang masih ada. Cagar budaya sebagai peninggalan dari masa lampau yang dapat menjadi gambaran keberlanjutan suatu permukiman memerlukan identifikasi, registrasi, preservasi, serta restorasi untuk dapat menggambarkan ada atau tidaknya keberlanjutan budaya tersebut. Perlu adanya perubahan cara berpikir ketika menilai objek peninggalan dari suatu periode yang berasal dari suatu bangsa yang dapat menumbuhkan perasaan sentimen politik dan sejarah terhadap bangsa pendatang. Selain itu, diperlukan suatu modifikasi dari cara penilaian atau model penilaian terhadap bangunan cagar budaya dengan menggunakan cara pandang yang

lebih adaptif terhadap kondisi dan keperluan masyarakat, tempat bangunan tersebut berdiri. Selama ini penilaian terhadap nilai penting suatu objek peninggalan budaya secara tradisional mengandalkan penilaian aspek kesejarahan, sejarah seni, dan arkeologi yang seolah menempatkannya pada konteks waktu masa lalu. Selama ini belum ada standar baku mengenai tata cara penilaian bangunan cagar budaya yang baku yang diterbitkan oleh lembaga atau institusi berwenang (Suryaningsih and Purwestri 2013, 619). Penilaian pada bangunan yang dianggap memiliki nilai penting untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, senantiasa berpedoman pada kaidah pelestarian. Salah satu elemen pokok dalam penilaian tersebut adalah otentisitas dan integritas (kesatuan antar komponen bangunan dan atau dengan lingkungan sekitar), elemen lain adalah pola budaya yang kemudian akan tampak (Septirina, Takeo, and Satoru 2016, 260-261).

Kriteria yang dapat diajukan di antaranya terkait keadaan atau kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, kondisi kedaerahan, pengaruh asing dalam bangunan, adaptasi, pemanfaatan dan keterkaitan dengan negara asal pembuatnya (Van Roosmalen 2003, 124-127; Mason 2008, 182-183). Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai sejauh mana arsitektur yang berkaitan dengan perencanaan kota di daerah koloni tersebut bersifat unik, menghasilkan gaya yang khas untuk suatu wilayah dan periode tertentu, menghasilkan perpaduan budaya, dan lain-lain. Berdasarkan deskripsi karakteristik ini, dapat dibuat penjelasan tentang signifikansi warisan budaya material ini

Salah satu model penilaian bangunan cagar budaya (*cultural heritage building*) yang dianggap cukup komprehensif untuk diadaptasi adalah yang pernah dilakukan oleh Harold Kalman di Amerika Serikat. Model yang diajukan mencakup tahapan evaluasi terhadap kriteria arsitektur, kesejarahan, lingkungan, pemanfaatan, dan integritas. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan indentifikasi definisi dari tiap kriteria untuk dapat dioperasionalisasikan, dilanjutkan dengan memberikan skor atau penilaian dari masing-masing kriteria. Pada akhirnya, setiap

bangunan akan memiliki nilai total dari kriteria-kriteria yang dinilai dalam bentuk harkat/nilai akhir (nilai total) (Kalman 1980, 25-29). Model inilah yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada terhadap objek penelitian, yaitu bangunan cagar budaya di Kulon Progo.

Penyesuaian antara konsep Kalman dengan yang digunakan di Kulon Progo dilakukan karena karakteristik bangunan yang ada di Kulon Progo pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya, sangat berbeda dengan karakteristik bangunan yang ada di Amerika. Perbedaan utama tentu terletak pada karakteristik arsitektur, termasuk material yang digunakan, desain bangunan, masa gaya bangunan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bangunan tersebut didirikan. Informasi yang diperoleh dan dideskripsikan lebih sederhana dan berbeda jika membandingkan antara bangunan tradisional joglo di Kulon Progo dengan bangunan gedung Empire State Building di New York.

Melalui cara atau model penilaian kuantitatif, maka setiap bangunan dapat diketahui nilai kuantitatif/skornya dan selanjutnya dilakukan perbandingan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, memungkinkan menghasilkan urutan peringkat nilainya (*ranking*). Meskipun demikian, tidak dapat dipandang mudah untuk menilai dengan metode kuantitatif ini. Nilai penting yang melekat pada cagar budaya sering tumpang tindih dan lebih rumit untuk dapat dipisahkan secara mutlak.

Pemingkatan berdasarkan penilaian bangunan cagar budaya adalah langkah yang sangat penting. Memperoleh peringkat dengan menggunakan penilaian atau skor dari bangunan cagar budaya sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan, terutama jika dikaitkan dengan pemanfaatan dan pendayagunaan bangunan cagar budaya hingga upaya pengembangannya jika diperlukan pada masa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kegiatan pelestarian bangunan cagar budaya meliputi aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Sedangkan jenis-

jenis pengejawantahan dari kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sangat beragam. Keragaman jenis atau bentuk kegiatan terkait dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan cagar budaya memiliki konsekuensi yang berhubungan dengan skala prioritas mengingat keterbatasan sumber daya.

Bangunan cagar budaya berhak memperoleh pendanaan untuk kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan pembiayaan pada tiap daerah yang memiliki bangunan cagar budaya. Oleh karena itu, diperlukan urutan prioritas bangunan cagar budaya yang akan dibiayai dalam konteks pelestariannya. Penentuan prioritas ini tidak mudah. Perlu adanya pemeringkatan atau *ranking* terhadap bangunan cagar budaya yang menunjukkan urutan skala prioritas.

Bangunan cagar budaya yang cukup banyak dijumpai di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas bangunan berarsitektur tradisional Jawa maupun bangunan berarsitektur modern yang berasal dari periode kolonial—kemerdekaan dan telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Berdasarkan data inventarisasi cagar budaya yang telah dilakukan oleh Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan) Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2016—2022, terdapat 60 bangunan cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo. Cagar Budaya dari jenis bangunan ini menjadi jenis paling dominan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Keseluruhan jumlah bangunan cagar budaya tersebut kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai bangunan hunian atau rumah tinggal, bangunan fasilitas umum, bangunan perkantoran, bangunan industri, dan bangunan tempat peribadatan. Karakteristik dari tiap-tiap bangunan tersebut secara garis besar merupakan bangunan arsitektur tradisional (menggunakan konstruksi kayu) dan bangunan arsitektur modern—kolonial (menggunakan konstruksi dinding bata dan plaster, serta konstruksi rangka besi atau baja).

Dalam penelitian ini, objek kajian akan dibatasi pada bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai bangunan untuk fasilitas umum, bangunan instansi pemerintah, sekolah,

dan milik pribadi. Bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai fasilitas umum tentu memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah karena biasanya berkaitan erat dengan fungsi layanan kepada masyarakat.

Sejauh ini penilaian bangunan cagar budaya dilakukan dalam wujud kajian penyusunan naskah rekomendasi penetapan sebagai cagar budaya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Seperti apa hasil penilaian bangunan cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan metode penilaian kuantitatif?
2. Sejauh manakah metode tersebut dapat diterapkan dalam memperoleh peringkat bangunan cagar budaya berdasarkan skor angka penilaian di Kabupaten Kulon Progo jika dikaitkan dengan variabel yang dinilai?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberikan penilaian terhadap beberapa variabel serta menghasilkan nilai pada masing-masing bangunan cagar budaya dengan tujuan, antara lain:

1. Menghasilkan nilai bersifat kuantitatif berdasarkan variabel pengamatan dalam upaya menentukan nilai keseluruhan bangunan cagar budaya;
2. Menghasilkan peringkat berdasarkan nilai kuantitatif yang telah diperoleh masing-masing bangunan cagar budaya sebagai objek penelitian, yang dapat dijadikan referensi pertimbangan dalam konteks upaya pelestarian cagar budaya yang di dalamnya terdapat aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

2. Metode

Penelitian ini melakukan modifikasi atau adaptasi terhadap instrumen penilaian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian serta selaras dengan karakter bangunan yang ada di Kulon Progo. Kriteria dalam penilaian yang diajukan oleh peneliti dari luar negeri seringkali kurang adaptif dan tidak memperhatikan cara pandang maupun

kepentingan yang berkembang di wilayah mana bangunan tersebut berdiri (Van Roosmalen 2003, 124-126; ICOMOS 2003, 11).

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini disusun berdasarkan cara penilaian bangunan yang diajukan oleh Harold Kalman (Kalman 1980, 4-6). Karena cara ini diterapkan di luar Indonesia, perlu dilakukan modifikasi pada variabelnya yang selaras dengan kondisi di Indonesia. Variabel penilaian yang digunakan di penelitian ini yaitu:

1. **Arsitektur**, meliputi: gaya, konstruksi, periodisasi, arsitek rencana, desain interior;
2. **Kesejarahan**, meliputi: keterkaitan pada tokoh, peristiwa bersejarah, konteks dalam sejarah;
3. **Lingkungan**, meliputi: tata letak dan keberlanjutannya termasuk sebagai *landmark*;
4. **Pemanfaatan**, meliputi: kesesuaian pemanfaatan, adaptasi, publik, utilitas, biaya perawatan, dan;
5. **Integritas dan Otentisitas**, meliputi: keletakan/posisi/in-situ, *alterasi* (ubahan), kondisi.

Variabel kelima dirasa perlu ditambahkan dengan otentisitas karena faktor ini penting untuk menjelaskan sejauh mana suatu bangunan mampu mempertahankan keaslian dan otentisitas asal-usulnya. Penggunaan model matematika ini juga dapat digunakan dalam kajian evaluasi dan penilaian lahan (Putranto, Sutikno, and Suharyadi 2016, 4). Tiap variabel akan diberikan skor yang memiliki rentang nilai dari 1 hingga 4 untuk tiap subvariabelnya. Angka ini melambangkan perbedaan rentang nilai terendah hingga tertinggi. Kemudian tiap-tiap variabel akan diberi nilai bobot (di mana variabel tersebut dianggap sebagai faktor pembobot) (Putranto, Sutikno, and Suharyadi 2016, 5; Widiatmaka and Hardjowigeno 2011, 37-48).

Nilai faktor pembobot akan berada di rentang nilai 1 atau 2. Nilai ini ditentukan oleh peneliti berdasar pendekatan teoritik dan bekal pengetahuan. Selain ditentukan oleh peneliti, sebenarnya dikenal beberapa cara lainya yaitu:

1. Penelitian tersendiri mengenai faktor pembobot dan nilainya;
2. Hasil penelitian tentang faktor pembobot dan nilainya yang pernah dilakukan;
3. Data dari responden terpilih yang diambil dari para pakar yang dianggap kompeten terhadap pelestarian bangunan cagar budaya khususnya, sehingga mampu merumuskan faktor pembobot dan nilainya, serta;
4. Justifikasi peneliti yang pernah melakukan penelitian sejenis.

Dalam penelitian ini akan digunakan justifikasi dari peneliti. Distribusi nilai dari faktor pembobot pada tiap variabel penilaian yang tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Nilai Bobot Tiap Variabel
(Sumber: Kalman, 1980 dengan modifikasi oleh Tim Penelitian 2023)

No	Variabel	Nilai Bobot
1	Arsitektur	1
2	Kesejarahan	1
3	Lingkungan	1
4	Pemanfaatan	2
5	Integritas dan Otentisitas	2

Pada tabel di atas, nilai bobot untuk variabel pemanfaatan serta integritas dan otentisitas memiliki nilai 2, sedangkan nilai bobot untuk variabel lainnya adalah 1. Artinya, di sini variabel pemanfaatan serta variabel integritas dan otentisitas memiliki nilai dua kali lebih besar (secara matematis) dibanding variabel arsitektur, kesejarahan, dan lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh peningkatan dari bangunan cagar budaya yang digunakan sebagai unit analisis, lebih dititikberatkan pada aspek pemanfaatan bangunan cagar budaya terkait dengan fasilitas umum yang dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Proses penghitungan dilakukan dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$HKB = (HV1*PB)+(HV2*PB)+(HV3*PB)+(HV4*PB)+(HV5*PB)$$

- HKB: Nilai Total Bangunan
- HV1: Nilai Variabel 1
- HV2: Nilai Variabel 2
- HV3: Nilai Variabel 3
- HV4: Nilai Variabel 4
- HV5: Nilai Variabel 5
- PB: Nilai Bobot

Hasil penilaian dengan model di atas akan menghasilkan nilai total jika diurutkan akan menghasilkan suatu pemeringkatan berdasarkan atas capaian nilai total yang diperoleh masing-masing bangunan. Sebelumnya, dengan menggunakan statistik deskriptif sederhana, dilakukan pengklasifikasian bangunan-bangunan yang telah memperoleh nilai menjadi empat kelas berdasarkan faktor ketermanfaatan dan kelestariannya. Keempat kelas tersebut adalah kelas ketermanfaatan dan kelestarian rendah hingga kelas ketermanfaatan dan kelestarian sangat tinggi seperti tersaji pada Tabel 2 ini.

Tabel 2. Kelas Ketermanfaatan dan Kelestarian (Sumber: *Tim Penelitian 2023*).

Interval Kelas	Indeks/Grade	Kelas Ketermanfaatan dan Kelestarian
94-115	IV	Sangat Tinggi
72-93	III	Tinggi
50-71	II	Sedang
28-49	I	Rendah

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini akan menggunakan data bangunan cagar budaya yang memiliki fungsi sebagai rumah tinggal dan fasilitas

pemerintah sebagai unit analisisnya. Data dari kantor Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan jumlah keseluruhan bangunan cagar budaya berjumlah 60 bangunan (<https://bit.ly/cagarbudayakulonprogo>) dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, seperti yang tersaji pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo (Sumber: Rekapitulasi data Kundha Kabudayan Kulon Progo DIY Tahun 2016-2022)

No	Fungsi Bangunan	Jumlah
1	Bangunan Rumah Tinggal	9
2	Bangunan Industri	1
3	Bangunan Perkantoran	18
4	Bangunan Peribadatan	8
5	Bangunan Fasilitas Umum (sekolah, pasar, rumah sakit)	24
Jumlah Total		60

Berdasarkan keseluruhan jumlah bangunan cagar budaya tersebut, kemudian dipilih sepuluh (10) bangunan cagar budaya untuk dilakukan pengamatan dan penilaian. Alasan pemilihan bangunan-bangunan tersebut didasarkan pada fungsi dan pemanfaatannya pada saat ini serta berada di bawah pengelolaan, penguasaan, dan/atau kepemilikan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo (lihat Tabel 4).

Kesepuluh bangunan cagar budaya dalam penelitian ini bukanlah sampling representatif dari jumlah total bangunan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Artinya, hasil penilaian dan pemeringkatan kesepuluh bangunan ini tidak mencerminkan peringkat dari keseluruhan bangunan cagar budaya lainnya. Peringkat yang dihasilkan hanya

mewakili bangunan-bangunan yang dijadikan objek penelitian ini. Idealnya, objek penelitian adalah keseluruhan populasi bangunan cagar budaya yang ada.

Data bangunan tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif berjenjang dengan faktor pembobot. Serta selanjutnya akan menghasilkan nilai akhir berdasarkan indeks yang telah disusun, hingga menghasilkan peringkat bangunan cagar budaya.

Penilaian terhadap sepuluh bangunan cagar budaya dilakukan pada 20 komponen atau elemen amatan yang menjadi subvariabel dari variabel arsitektur, kesejarahan, lingkungan, pemanfaatan, dan integritas–otentisitas (lihat lampiran 1).

Pernyataan tentang nilai kurang lebih hampir sama dengan fakta dan berbeda dengan selera. Hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat yang berkaitan dengan penilaian terhadap suatu objek, khususnya bangunan cagar budaya (Kalman 1980, 10). Dari sisi kriteria juga terdapat perbedaan dan juga pada hasil penilaiannya. Proses survei lapangan untuk melakukan pengamatan data sangat menentukan akurasi hasil.

Hasil penilaian pada sepuluh bangunan cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo menghasilkan nilai total sekaligus peringkat yang diperoleh nampak pada Tabel 5, sedangkan detail penilaiannya dapat dilihat pada lampiran 1 berupa tabel lengkap hasil penilaian.

Pada Tabel 5 menunjukkan peringkat yang diperoleh berdasarkan nilai total masing-masing bangunan. Bangunan Pesanggrahan Bulurejo, Kapanewon Galur, SDN Kalibawang, eks Kapanewon Wates, Bale Agung, Joglo R. Sugeng Dhipokawotjo, dan SMP Bopkri I Wates berada pada kelas ketermanfaatan dan kelestarian tinggi (*grade III*). Skor akhir yang diperoleh berturut-turut adalah Pesanggrahan Bulurejo (nilai 92), Kapanewon Galur (nilai 90), SDN Kalibawang (nilai 86), eks Kapanewon Wates (nilai 81), Bale Agung (nilai 78), Joglo R. Soengeng Dhipokawotjo (nilai 78), dan SMP Bopkri I Wates (nilai 77). Bangunan Pesanggrahan Bulurejo memperoleh nilai total tertinggi jika dilihat dari variabel yang diamati

khususnya pada variabel kesejarahannya (lihat lampiran 1), di mana bangunan Pesanggrahan Bulurejo memiliki kaitan erat dengan tokoh raja Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono VII sebagai tempat pesanggrahan beliau di mana pada waktu-waktu tertentu beliau berdiam di bangunan ini. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, bangunan ini sempat dijadikan sebagai tempat pengepul nila (bahan pewarna alam) di wilayah Kulon Progo yang merupakan salah satu penghasil komoditas nila terbesar pada saat itu. Bangunan Pesanggrahan Bulurejo pada saat ini difungsikan sebagai museum benda purbakala di Kabupaten Kulon Progo.

Setelah melihat bangunan cagar budaya yang menempati kelas ketermanfaatan dan kelestarian tinggi, maka perlu dilihat juga bangunan cagar budaya dengan kelas ketermanfaatan dan kelestarian sedang. Perlu diketahui bahwa dari hasil penilaian, tidak diperoleh adanya bangunan yang masuk pada kelas ketermanfaatan dan kelestarian sangat tinggi dan rendah. Terdapat tiga bangunan yang masuk dalam kelas ketermanfaatan dan kelestarian sedang, secara berurutan adalah bangunan eks Kapanewon Sentolo (nilai 71), eks Kapanewon Kalibawang (nilai 66) dan eks Kapanewon Nanggulan (nilai 64).

Kelompok bangunan dengan kelas ketermanfaatan dan kelestarian sedang dengan nilai terendah dimiliki bangunan eks Kapanewon Nanggulan. Jika dibandingkan dengan nilai bangunan lain pada kelompok yang sama, variabel yang menyebabkan bangunan eks Kapanewon Nanggulan memperoleh nilai paling rendah terdapat pada variabel kesejarahan, karena keterkaitannya dengan kesejarahan tokoh, momentum, atau konteks sejarah lainnya memiliki nilai rendah. Dalam penilaian aspek kesejarahan bangunan eks Kapanewon Nanggulan hanya tercatat pernah menjadi kantor kapanewon dan pernah digunakan sebagai bangunan militer tentara Jepang. Pada variabel pemanfaatan dan otentisitas (kriteria yang diberi bobot 2), nilai yang diperoleh relatif sama dengan bangunan kelompok kelas ketermanfaatan dan kelestarian sedang lainnya.

Sedangkan pada bangunan eks Kapanewon Sentolo dan eks Kapanewon Kalibawang,

Tabel 4. Deskripsi Bangunan Cagar Budaya Sebagai Objek Penelitian (Sumber: www.jogjacagar.jogjapro.go id.; Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo DIY; Tim Peneliti 2023)

No	Nama Bangunan	Deskripsi	Dokumentasi Visual	Status
1	Bale Agung	<p>Bale Agung merupakan bangunan bergaya arsitektur Indis beratap limasan. Berdenah segi empat dengan satu ruangan. Bale Agung didirikan pada tahun 1918. Bale Agung adalah tempat penandatanganan penggabungan dua kabupaten yaitu Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Kulon Progo. Kondisi bangunan terawat. Bangunan ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo karena terletak di lingkungan pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo (Bupati 2016, 4).</p>		CB
2	Kapanewon Galur	<p>Bangunan lama berdenah persegi beratap tajuk. Dinding menggunakan panil kayu dengan kaca, sebelah barat dan timur. Fasad depan dibiarkan terbuka dan menyambung dengan pendopo baru. Bangunan terdiri atas pendopo, bangunan utama, <i>sepen</i> di sisi belakang serta bangunan <i>gandok</i> di sebelah timur pendopo. Bangunan ini merupakan penanda wilayah Kadipaten Pakualam sebagai Kabupaten Galur di era kolonial. Saat ini, bangunan Kapanewon Galur masih digunakan untuk kantor administrasi Kapanewon Galur. Bangunan masih berada di lokasi yang sama. Terdapat bagian tambahan di sisi samping timur bangunan berupa atap tambahan yang digunakan untuk menyambung bagian pendopo dan bangunan di sebelahnya (Bupati 2017, 3).</p>		CB

No	Nama Bangunan	Deskripsi	Dokumentasi Visual	Status
3	eks Kapanewon Kalibawang	<p>Berdiri pada tahun 1855 kompleks Kapanewon Kalibawang memiliki pola tata letak yang mengikuti pola tata letak kota periode Islam, yang memiliki pasar, masjid dan alun-alun. Bangunan ini bergaya arsitektur Indis. Bagian interior seperti pintu-pintu dan jendela masih dalam kondisi asli. Terdapat perubahan pada atap depan untuk menyesuaikan adanya ubahan bagian fasad. Pada dekade 1970-an, diganti dengan bangunan baru. Fungsi sebagai layanan kantor kapanewon berpindah pada bangunan baru dalam satu kompleks yang sama (Bupati 2017, 3).</p>		CB
4	eks Kapanewon Nanggulan	<p>Bangunan ini bergaya arsitektur Indis dan dimanfaatkan sebagai bangunan penunjang Puskesmas Nanggulan. Bangunan beratap limasan, berdinding plester, dan berupa <i>rubble wall</i> yang menunjukkan ciri dari bangunan Indis. Bangunan ini merupakan eks kantor Kapanewon Nanggulan. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini pernah digunakan sebagai markas tentara. Tidak ada perubahan lokasi dan alterasi tetapi terdapat kondisi kerusakan bangunan pada plafon yang berlubang, ubin yang pecah, cat yang mengelupas, dan pelapukan pada komponen kayu bangunan (Bupati 2020, 3).</p>		CB

No	Nama Bangunan	Deskripsi	Dokumentasi Visual	Status
5	eks Kapanewon Wates	<p>Bangunan ini memiliki gaya arsitektur yang sejenis dengan bangunan Kapanewon Galur. Bangunan berkonstruksi kayu dengan atap limasan, berdinding panil kayu dengan kaca di bagian fasad/muka. Saat ini tidak lagi difungsikan sebagai kantor Kapanewon Wates. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada sekitar tahun 1922. Lokasi bangunan masih terletak di titik yang sama. Perubahan terjadi pada bangunan sisi timur berupa bangunan tambahan baru yang menyambung dengan pendopo. Secara keseluruhan, bangunan ini masih terawat dengan baik. Terdapat beberapa kerusakan seperti plafon yang rusak dan tembok yang lembab (Bupati 2021, 3).</p>		CB
6	Pesanggrahan Bulurejo	<p>Bangunan ini disebut juga sebagai eks Pengepul Nila, memiliki denah persegi panjang dengan gaya arsitektur campuran Jawa-Kolonial. Memiliki enam ruangan. Dinding sisi timur terbuat dari kayu yang dipadukan dengan kaca, sedangkan pada dinding bagian barat adalah dinding bata. Plafon bangunan ini menggunakan anyaman rotan dan lantai bangunan dari batu alam. Bangunan ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII sebagai tempat istirahat. Kemudian bangunan ini berubah fungsi sebagai tempat pengumpul nila (pewarna alam indigo), dan pernah menjadi kantor Kabupaten Pengasih sekitar tahun 1931. Kondisi bangunan pesanggrahan baik dan terawat (Bupati 2016, 4).</p>		CB

No	Nama Bangunan	Deskripsi	Dokumentasi Visual	Status
7	Joglo R. Soegeng Dhipokawotjo	<p>Merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional Jawa. Dibangun pada tahun 1901 menurut informasi dari beberapa sumber. Bangunan-bangunan yang berada di kompleks tersebut terdiri atas pendopo, <i>longkangan</i>, <i>ndalem</i>, <i>gandok kiwa 1</i> dan <i>2</i>, serta <i>gadri</i> (Khoerul Muna 2022, 46-60). Pada masa penjajahan Jepang bangunan ini berfungsi sebagai sekolah dasar. Pada saat Agresi Militer Belanda II tahun 1948, bangunan ini sempat digunakan sebagai kantor bupati Kulon Progo dan juga sebagai markas pasukan gerilyawan. Pada tahun 1965 bangunan ini pernah dimanfaatkan dalam upaya perlawanan terhadap orang-orang komunis. Secara umum, bangunan ini dalam kondisi kurang terawat. Terdapat penambahan kamar mandi, lorong, dan bangunan baru di belakang <i>gadri</i> (Bupati 2017, 3)</p>		CB
8	eks Kapanewon Sentolo	<p>Merupakan bangunan bergaya arsitektur Indis, saat ini difungsikan sebagai fasilitas kesehatan (Puskesmas Sentolo I). Awalnya bangunan ini didirikan sebagai kantor pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo yang beribukota di Sentolo sebelum tahun 1951. Sebagai bagian dari pola tata letak pusat pemerintahan lama, di sekitar bangunan, dahulu terdapat alun-alun, masjid, serta pasar. Alterasi pada bangunan ini tidak terlihat terlalu signifikan. Secara keseluruhan, bangunan ini masih terawat dengan baik. Terdapat beberapa kerusakan seperti plafon yang rusak dan bercak jamur pada tembok (Bupati 2021, 3).</p>		CB

No	Nama Bangunan	Deskripsi	Dokumentasi Visual	Status
9	SDN Kali-bawang	<p>Bangunan ini bergaya arsitektur gabungan arsitektur Indis dan Jawa. Memiliki bentuk atap limas dengan genteng <i>vlaams</i>. Bangunan yang menjadi cagar budaya hanya bangunan ruang kelas dan ruang guru di bagian depan dari kompleks sekolah, Tidak banyak dilakukan ubahan, kecuali perluasan ruang belakang dan penambahan bangunan pendukung sekolah lain dalam satu halaman (Bupati 2022, 3).</p>		CB
10	SMP Bopkri 1 Wates	<p>SMP Bopkri 1 Wates merupakan bangunan sekolah yang didirikan pada tahun 1921. Bangunan berarsitektur kolonial ini memiliki denah bangunan berbentuk huruf 'U'. Pada teras depan terdapat kanopi yang disangga oleh pilar cor berpenampang persegi. <i>Gevel</i> pada bangunan ini berbentuk segitiga. Ventilasi dan daun jendela pada bangunan ini berbentuk <i>krepyak</i>. Jendela dan ventilasi di setiap ruang dilengkapi dengan terali yang terbuat dari besi. Terdapat dua jenis pintu pada bangunan ini yaitu <i>krepyak</i> dan <i>kupu tarung</i> yang terbuat dari kayu. Dinding luar memiliki struktur bata miring sebagai perkuatan. SMP Bopkri 1 Wates berdiri pada tahun 1921 sebagai <i>Holland-sche Javansche School</i> (HJS), yaitu sekolah yang diperuntukkan khusus bagi orang Jawa. Terdapat indikasi alterasi pada bangunan utama. Bagian fasad juga telah tertutup oleh penambahan bangunan baru. Kerusakan bangunan yang dominan dapat ditemukan pada bagian plafon yang rusak, cat tembok yang mengelupas, gerbang pagar yang bengkok, dan trali yang berkarat (Bupati 2018, 3).</p>	 	CB CB

*) CB = Cagar Budaya

Tabel 5. Peringkat Hasil Penelitian Berdasarkan Kelas Ketermanfaatan dan Kelestarian (Sumber: *Tim Penelitian 2023; penilaian rinci dapat dilihat pada lampiran 1*)

No	Nama Bangunan	Nilai Total	Indeks/ Grade	Kelas Ketermanfaatan dan Kelestarian
1	Pesanggrahan Bulurejo	92	III	Tinggi
2	Kapanewon Galur	90	III	Tinggi
3	SDN Kalibawang	86	III	Tinggi
4	eks Kapanewon Wates	81	III	Tinggi
5	Bale Agung	78	III	Tinggi
6	Joglo R. Soegeng Dhipo- kawotjo	78	III	Tinggi
7	SMP Bopkri 1 Wates	77	III	Tinggi
8	eks Kapanewon Sentolo	71	II	Sedang
9	eks Kapanewon Kali- bawang	66	II	Sedang
10	eks Kapanewon Nang- gulan	64	II	Sedang

diklasifikasikan ke dalam kelas ketermanfaatan dan kelestarian sedang, karena hasil penilaian variabel integritas dan otentisitas nilainya rendah. Hal ini wajar karena variabel integritas dan otentisitas berhubungan erat dengan derajat perubahan yang dilakukan pada bangunan yang menentukan tingkat otentisitas bangunan. Bangunan eks Kapanewon Sentolo dan eks Kapanewon Kalibawang sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam mengurangi nilai otentisitas karena berkaitan dengan ciri arsitektur Indis yang selama ini menjadi ciri bangunan kapanewon pada era pemerintahan Kasultanan Yogyakarta.

Dengan membandingkan hasil penilaian dari bangunan yang berada pada kelompok kelas ketermanfaatan dan kelestarian tinggi terhadap kelompok kelas sedang, maka dapat dilihat adanya perbedaan nilai yang signifikan. Seperti telah disampaikan di bagian awal, penelitian ini dalam menggunakan penilaian secara kuantitatif dengan faktor bobot memberikan nilai bobot 1 dan 2. Nilai bobot 2 diberikan untuk kriteria pemanfaatan dan integritas–otentisitas yang

diamati pada tiap bangunan yang menjadi objek penelitian (unit analisis).

Pemanfaatan bangunan cagar budaya sesuai dengan fungsi aslinya maupun dengan fungsi baru sedikit banyak memberikan dampak bagi kondisi kelestarian bangunan tersebut. Adaptasi bisa saja dilakukan sepanjang tidak mengurangi, apalagi menghilangkan elemen-elemen yang mencerminkan nilai penting dari bangunan tersebut. Pada beberapa bangunan cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo yang menjadi objek penelitian ini, ditemukan beberapa perubahan pada elemen fisik bangunan seperti bentuk atap, tata ruang, fasad, serta kelengkapan lainnya. Sebenarnya bangunan tidak sepenuhnya memerlukan adanya adaptasi, melainkan manusia yang berkepentingan dan tinggal di dalamnya, yang memerlukan adaptasi (Wise, Moncaster, and Jones 2021, 511). Pemahaman mengenai proses adaptasi bangunan cagar budaya diperlukan untuk difungsikan kembali sesuai konteks kekinian merupakan suatu hal yang sangat penting (ICOMOS 2003, 21). Difungsikannya kembali bangunan cagar budaya dalam satu sisi

dapat lebih menambah nilai manfaat bahkan meningkatkan nilai penting yang terkandung di dalamnya. Namun sebaliknya, jika pemanfaatan bangunan cagar budaya dilakukan dengan melakukan ubahan yang tidak mengikuti kaidah pelestarian cagar budaya, dapat mengurangi nilai penting dari bangunan tersebut. Hal inilah yang terjadi pada bangunan eks Kapanewon Sentolo dan eks Kapanewon Kalibawang yang menjadi objek dalam penelitian ini.

4. Penutup

Penelitian terhadap bangunan cagar budaya menggunakan metode penilaian secara kuantitatif berjenjang dengan faktor pembobot belum banyak dilakukan. Penilaian lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua pendekatan ini pada prinsipnya akan saling mengisi untuk tujuan tertentu. Penelitian ini lebih bersifat menerapkan model penilaian tersebut jika dikaitkan dengan aspek pemanfaatan bangunan cagar budaya yang dapat berdampak terhadap kondisi kelestariannya, khususnya dari aspek integritas dan otentisitasnya.

Beberapa bangunan cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo yang kondisinya bervariasi dan secara kualitatif relatif baik, tetapi terkendala dalam pemanfaatan dan berkaitan erat juga dengan pembiayaan dalam pemeliharannya. Oleh karena itu, bangunan cagar budaya yang secara kepemilikan dan pengelolaan berada di bawah pemerintah daerah lebih memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan dalam pemeliharannya yang lebih berkaitan dengan unsur kemudahan secara administrasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini adalah memperoleh pemeringkatan bangunan cagar budaya dari aspek ketermanfaatan dan kelestariannya (konsekuensi dari pemanfaatan yang berpotensi berimbas terhadap kelestarian bangunan). Bangunan cagar budaya Pesanggrahan Bulurejo (nilai 92) dan Kapanewon Galur (nilai 90) menduduki peringkat teratas dalam kelas ketermanfaatan dan kelestarian tinggi. Dari aspek pemanfaatannya, nilai Pesanggrahan Bulurejo dan Kapanewon Galur memiliki nilai yang sama. Keduanya dimanfaatkan dengan hampir tidak melakukan ubahan terhadap kondisi aslinya dan menunjukkan kondisi bangunan yang sangat terawat. Sedangkan

bangunan cagar budaya yang memiliki nilai paling rendah atau peringkat kelas ketermanfaatan dan kelestarian sedang adalah eks Kapanewon Kalibawang (nilai 66) dan eks Kapanewon Nanggulan (nilai 64). Keduanya memperoleh nilai paling rendah disebabkan karena aspek kelestarian untuk bangunan eks Kapanewon Kalibawang dan aspek lingkungan sekitar untuk bangunan eks Kapanewon Nanggulan. Perubahan cukup signifikan telah dilakukan pada bangunan eks Kapanewon Kalibawang, sehingga mengaburkan aspek arsitektural bangunan lamanya. Sedangkan bangunan eks Kapanewon Nanggulan nampak tidak memiliki kesinambungan dengan lingkungan sekitarnya, seolah-olah berdiri sendiri di lokasinya.

Demikian hasil penelitian ini mengenai pemeringkatan bangunan cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan titik berat pada aspek pemanfaatan dan pelestarian melalui penentuan kelas ketermanfaatan dan kelestariannya. Metode penilaian kuantitatif dengan faktor pembobot ini dirasakan setidaknya mampu menunjukkan korelasinya dengan kenyataan di lapangan dengan memperhatikan nilai dari kriteria atau aspek lainnya seperti, arsitektural, kesejarahan, dan lingkungan. Unsur kualitatif dalam metode ini juga tetap mendapatkan tempat sehingga tidak meninggalkan hal-hal yang diperlukan secara kualitatif dalam melengkapi penilaian kuantitatif yang menjadi fokus utama. Ke depannya, masih akan terus diperbaiki, khususnya dalam pendalaman variabel dan subvariabel yang ada serta menjabarkannya dalam nilai kuantitatif yang semakin valid.

Ucapan Terima kasih

Peneliti beserta tim mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan staf Kantor Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas segala bantuan yang diberikan kepada tim selama kegiatan berlangsung. Selain itu, ucapan terima kasih kami juga kami tujukan kepada para pengelola bangunan cagar budaya yang menjadi objek penelitian ini atas waktu dan kesediaannya untuk berdiskusi.

Daftar Pustaka

- Díaz-Andreu, Margarita. 2017. "Heritage Values and the Public." *Journal of Community Archaeology and Heritage* 4 (1): 2–6. <https://doi.org/10.1080/20518196.2016.1228213>.
- ICOMOS. 2003. "Icomos Charter- Principles for the Analysis , Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage." Victoria Falls Zimbabwe: ICOMOS 14th General Assembly.
- Kalman, Harold. 1980. "The Evaluation of Historic Building." In , 282. Ottawa: Minister of Environment.
- Khoerul Muna, Akhmad. 2022. "IDENTIFIKASI KERENTANAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DENGAN PEMERIKSAAN CEPAT JAVA RAPID VISUAL SCREENING SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI: KAJIAN TERHADAP BANGUNAN JOGLO RADEN SOEGENG DHIPOKAWOTJO, KULON PROGO." Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Mason, Randall. 2008. "Management for Cultural Landscape Preservation: Insights from Australia." In *Cultural Landscapes Balancing Nature And Heritage in Preservation Practice*, edited by Richard Longstreth. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.1111/j.1531-314x.2009.01045.x>.
- Putranto, Andi, Sutikno and Suharyadi. n.d. "Integrasi Foto Udara Dan Sistem Informasi Geografis Untuk Evaluasi Penentuan Letak Bangunan Candi Di Wilayah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Majalah Geografi Indonesia* 29 (1): 1–6. <https://doi.org/10.22146/mgi.13084>.
- Roosmalen, Pauline K M Van. 2003. "Changing Views on Colonial Heritage." In *Identification and Documentation of Modern Heritage*, edited by R and S.Haraguchi Van Oers, 121–32. Paris: World Heritage Centre.
- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. No.381-C-2016. Tahun 2016.
- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. No.438-A-2017. Tahun 2017.
- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. No.568-A-2018. Tahun 2018.
- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. No. 415-A-2020. Tahun 2020.
- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. No. 508-A-2021. Tahun 2021.
- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. No.461-C-2022. Tahun 2022.
- Septirina, Safiera Nur, Ozawa Takeo, and Kaku Satoru. 2016. "Conservation of Historical Architecture in Malioboro Street, Yogyakarta City, Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 225: 259–69. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.025>.
- Smith, Michael E., José Lobo, Matthew A. Peeples, Abigail M. York, Benjamin W. Stanley, Katherine A. Crawford, Nicolas Gauthier, and Angela C. Huster. 2021. "The Persistence of Ancient Settlements and Urban Sustainability." In *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118:1–8. <https://doi.org/10.1073/pnas.2018155118>.
- Suryaningsih, F., and N. Purwestri. 2013. "Documenting Living Monuments in Indonesia: Methodology for Sustainable Utility." *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-5/W2* (September): 617–22. <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-xl-5-w2-617-2013>.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Unesco-Cairo. 2013. *Guidelines to The Survey of Buildings and Open Spaces*. Cairo: UNESCO.
- Widiatmaka, Hardjowigeno and. 2011. *Evaluasi Lahan Dan Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. https://www.researchgate.net/publication/281685196_Evaluasi_Lahan_dan_Perencanaan_Tataguna_Lahan.
- Wise, Freya, Alice Moncaster, and Derek Jones. 2021. "Rethinking Retrofit of Residential Heritage Buildings." In *Buildings and Cities*, edited by Jacques Teller, 2:495–517.
- Milton Keynes, UK: Ubiquity Press. <https://doi.org/10.5334/bc.94>.

